

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIA HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 9

Bupati Mirna Backlist Kontraktor Nakal

KENDAL—Bupati Kendal, Mirna Annisa akan *membblacklist* terhadap sejumlah perusahaan jasa konstruksi yang melakukan kecurangan terhadap pengerjaan proyek di Kendal. Selain itu, pihaknya juga secara berani akan menanggihkan perpanjangan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) terhadap perusahaan yang memang bermasalah dan tidak profesional.

Selain itu, Mirna mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota dewan tidak ikut bermain proyek. Tujuannya agar ASN dan Dewan fokus pada tugasnya masing-masing. Sehingga tidak timbul kecurangan atau munculnya proyek-proyek seng-

gekan. "Proyek-proyek biarlah ditangani oleh perusahaan jasa konstruksi. Jadi yang ikut lelang adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Sehingga pekerjaannya bisa dilakukan profesional dengan hasil sesuai dan tidak mengecewakan masyarakat," ujarnya, kemarin (17/3).

Diakuinya, penangguhan perpanjangan SIUJK lantaran tak sedikit pengusaha yang bekerja tidak profesional. Banyak kasus pembangunan proyek di Kendal yang dikerjakan secara asal-asalan dan tidak tuntas.

"Kami pemerintah tidak pernah menghambat pembangunan di Kendal atau pengusaha jasa konstruksi. Kami cuma mengantisi-

pasi agar kejadian serupa, yakni proyek yang asal-asalan tidak terjadi lagi," paparnya.

Jadi, jika ada yang bilang Bupati Kendal menghambat perpanjangan SIUJK, hal itu menurutnya tidaklah benar. Karena ia bukan tidak mau mengeluarkan, tetapi ada pekerjaan kontraktor yang membutuhkan audit dan masih dalam pemeriksaan dari BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian karena dinilai bermasalah. "Penangguhan perpanjangan SIUJK itu hanya berlaku bagi sebagian pengusaha saja dan bukan semuanya," jelasnya.

Pihaknya juga berencana untuk memberikan *blacklist* kepada pengusaha-pengusaha nakal yang bekerja tidak profesional. Apalagi

sekarang telah ada dinas baru yang menangani hal terkait SIUJK yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kendal. "Bahkan bila perlu harus ada sanksinya bagi para pengusaha-pengusaha nakal tersebut," paparnya.

Mirna mencontohkan, pembangunan rumah dinas baru bupati di Kelurahan Jetus. Rumdin yang belum ia tempati itu ternyata pembangunannya tidak masuk dengan RPJMD. "Selama ini, bila pengusaha dan perusahaannya memenuhi syarat dan masih jelas, maka izinnya tetap kami keluarkan," paparnya.

Pemkab juga menjalin kerjasama dengan Tim Pengawal dan Penga-

man Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di Kendal benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. "Sehingga tidak terkesan main-main dan seadanya saja," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kendal, Adiputra mengungkapkan ada sekitar 30 pengusaha jasa konstruksi Kendal yang sudah mengajukan SIUJK. Namun belum ada satupun yang mendapatkannya. "Jika dalam waktu dekat belum juga mendapatkan SIUJK, maka kami akan melayangkan kembali surat permintaan audiensi dengan Bupati Kendal," katanya. (bud/zal)